



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Atas tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukannya. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam bekerja serta dalam membangun Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 23 Juni 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG



Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAKB TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAKB.....	39
2.3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis DPPPAKB.....	56
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	57
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	75
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	75
3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	78
3.3 Program dan Kegiatan	87
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	108
BAB V PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C. 29. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2024.....	10
Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	59
Tabel T-C. 32. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPPAB Beserta Target Capaian Tahun 2024-2026.....	85
Tabel T-C. 33. Rumusan Rencana Program Dinas PPPAB Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	91
Tabel T-C. 34. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas PPPAB Tahun 2024.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja DPPPAB Tahun 2026 merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) DPPPAB Tahun 2024-2026.
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026. Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Dokumen Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

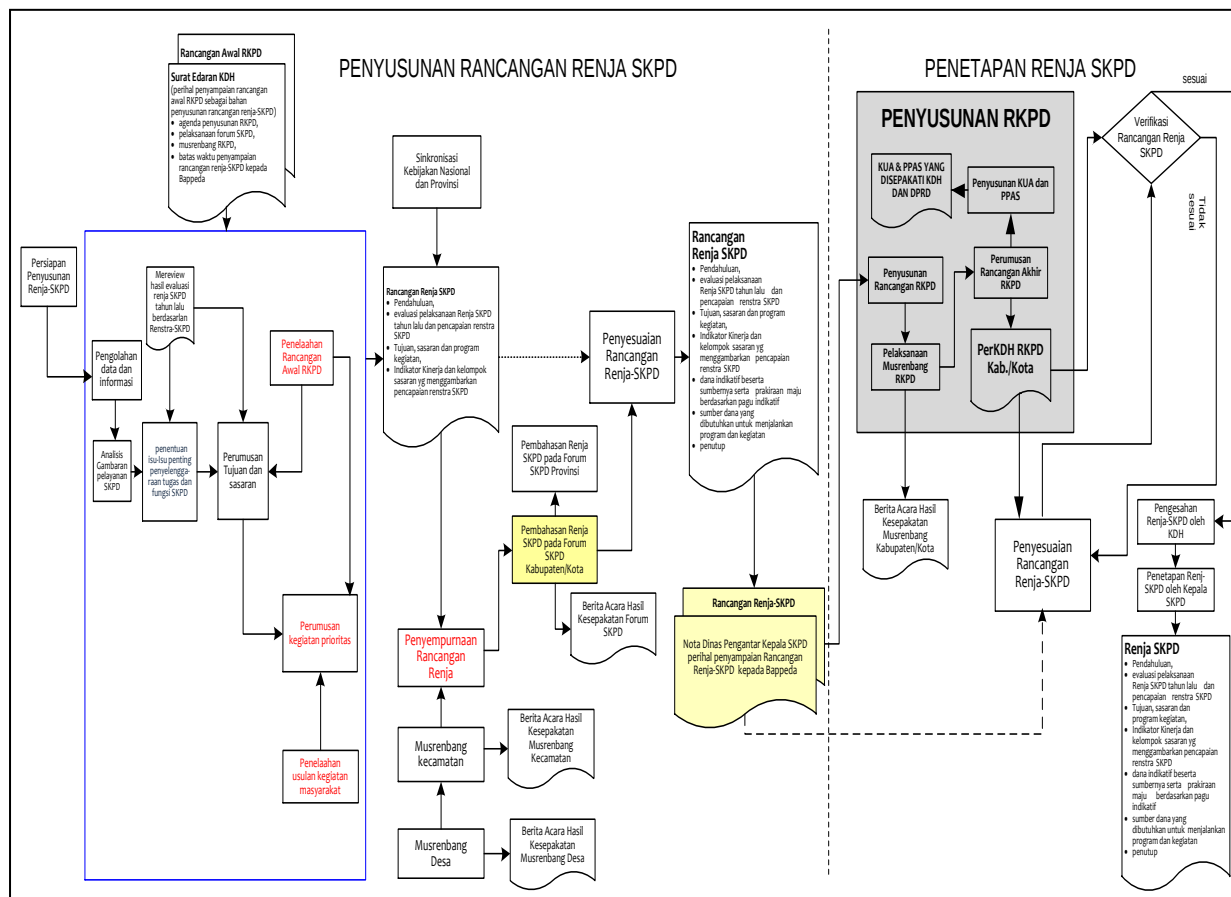
Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang dan Renstra DPPPAB Tahun 2024-2026.

3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
2. Meningkatnya Pembangunan Keluarga
Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga
3. Mewujudkan Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik
Indikator : Persentase Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
Indikator : Persentase Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
2. Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
Indikator : Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

3. Meningkatnya Nilai KLA

Indikator : Predikat Kota Layak Anak

4. Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang

Indikator : Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun

5. Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut :

1. Tujuan RPD : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang berdaya saing
 Sasaran RPD : Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
2. Tujuan RPD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik menuju tercapainya Good Governance
 Sasaran RPD : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 20221 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
11. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
12. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);

13. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 246);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan induk tahun 2026, dan tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 sebagai :

1. Perwujudan Tujuan dan Sasaran ke dalam rencana kegiatan pembangunan.
2. Perumuskan program-program prioritas.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2026, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rincian rencana-rencana kerja PD dan rincian anggaran untuk menunjang rencana-rencana kerja PD.

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut.

Tabel T-C.29
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan KB Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi i Capaian Kinerja Renstra Perangkat at Daerah sampai dengan Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	
									I		II		III		IV			13		14					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	020801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai i)	0	12.847.597.121	0	0	67	4.822.833.114	0	1.003.306.219	74,300	1.334.404.963	74,300	1.024.559.774	74,300	1.179.006.239	74,300	4.541.277.195	74,300	4.541.277.195	100	35,347	Sekretariat
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0		0		85		0		0		0	89,740		89,740		89,740			100		Sekretariat
2		020801201	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	3.727.850	25	0	100	1.784.050	100	613.800	100	1.330.000	100	3.727.850	100	3.727.850	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
3		020801201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	533.800	1	0	1	180.000	2	353.800	2	0	2	533.800	2	533.800	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
4		020801201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- S K P D (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	0	0	1	506.450	1	0	1	506.450	1	0	1	0	1	506.450	1	506.450	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
5		020801201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	525.000	0	0	0	0	0	0	1	525.000	1	525.000	1	525.000	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
6		020801201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- S K P D (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	0	0	1	560.000	1	0	1	560.000	1	0	1	0	1	560.000	1	560.000	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab					
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7		020801201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	560.000	0	0	0	0	0	0	1	560.000	1	560.000	1	560.000	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
8		020801201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	537.600	4	0	4	537.600	4	0	4	537.600	4	537.600	4	537.600	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
9		020801201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	505.000	1	0	2	0	3	260.000	4	245.000	4	505.000	4	505.000	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
10		020801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	0	10.812.512.417	0	0	100	3.803.171.570	25	801.693.695	100	1.098.720.803	100	789.210.958	100	897.388.226	100	3.587.013.682	100	3.587.013.682	100	33,175	Sub Koordinator Keuangan
11		020801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	10.812.512.417	0	0	30	3.802.106.570	30	801.693.695	30	1.098.160.803	30	788.705.958	30	897.388.226	30	3.585.948.682	30	3.585.948.682	100	33,165	Sub Koordinator Keuangan
12		020801202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	560.000	4	0	4	560.000	4	0	4	560.000	4	560.000	4	560.000	100	100	Sub Koordinator Keuangan
13		020801202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	505.000	1	0	2	0	2	505.000	4	0	4	505.000	4	505.000	100	100	Sub Koordinator Keuangan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat at Daerah sampai dengan Renja Perangk at Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab					
								I		II		III		IV											
								9		10		11		12							13		14		15
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
14		020801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	0	178.402.100	0	0	100	316.937.550	0	57.492.367	100	67.969.505	100	81.582.339	100	99.876.510	100	306.920.721	100	306.920.721	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15		02080120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	15.790.000	0	0	1	10.452.800	0	0	1	7.937.650	1	459.000	1	0	1	8.396.650	1	8.396.650	100	53,177	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16		02080120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	75.787.000	0	0	0	0	1	19.000.000	1	54.834.000	1	73.834.000	1	73.834.000	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17		02080120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	89.461.600	0	0	2	39.998.750	0	0	2	20.314.900	2	13.499.000	2	4.536.000	2	38.349.900	2	38.349.900	100	42,867	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18		02080120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	73.150.500	0	0	2	30.740.000	0	10.962.750	1	430.000	1	7.320.000	2	7.942.550	2	26.655.300	2	26.655.300	100	36,439	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
19		02080120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	159.959.000	0	46.529.617	0	39.286.955	1	41.304.339	1	32.563.960	1	159.684.871	1	159.684.871	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20		020801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	0	1.217.810.204	0	0	100	430.096.752	0	97.259.416	100	75.642.673	100	100.044.429	100	109.976.259	100	382.922.777	100	382.922.777	100	31,444	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
21		02080120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	576.100.000	0	0	4	223.452.568	1	51.475.468	2	30.450.312	3	52.475.468	4	63.259.624	4	197.660.872	4	197.660.872	100	34,310	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22		02080120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	376.813.294	0	0	4	80.459.000	1	13.794.328	2	14.116.569	3	16.860.944	4	19.089.139	4	63.860.980	4	63.860.980	100	16,948	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
23		02080120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	264.896.910	0	0	4	126.185.184	1	31.989.620	2	31.075.792	2	30.708.017	4	27.627.496	4	121.400.925	4	121.400.925	100	45,829	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

24		020801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	0	638.872.400	0	0	0	100	268.899.392	0	46.860.741	100	90.287.932	100	53.108.248	100	70.435.244	100	260.692.165	100	260.692.165	100	40,805	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
25		02080120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	150.464.000	0	0	1	53.090.696	0	12.232.924	1	7.738.616	1	18.242.824	1	14.661.232	1	52.875.596	1	52.875.596	100	35,142	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
26		02080120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	385.410.000	0	0	5	112.349.696	0	28.559.893	5	13.033.300	5	28.248.500	5	35.062.530	5	104.904.223	5	104.904.223	100	27,219	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
27		02080120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	88	30.459.000	0	0	44	16.028.400	47	0	88	13.954.250	88	29.982.650	88	29.982.650	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
28		02080120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	102.998.400	0	0	1	73.000.000	0	6.067.924	1	53.487.616	1	6.616.924	1	6.757.232	1	72.929.696	1	72.929.696	100	70,807	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	35,347		
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR		

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
										I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

34	-	020803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Dengan Satuan:Rasio)	0	825.145.000	0	0	14,350	338.057.850	0	9.811.000	20,530	4.657.000	45,570	65.678.000	65,830	161.692.900	65,830	241.838.900	65,830	241.838.900	100	29,309	Bidang PPA
35		020803201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang Berkerja Sama Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Dengan Satuan:Media)	0	459.530.000	0	0	2	100.721.850	0	9.811.000	0	1.057.000	1	2.050.000	2	87.096.350	2	100.014.350	2	100.014.350	100	21,764	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
36		020803201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	147.230.000	0	0	1	65.000.000	0	0	0	0	0	0	1	64.943.000	1	64.943.000	1	64.943.000	100	44,110	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
37		020803201002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	312.300.000	0	0	34	35.721.850	0	9.811.000	34	1.057.000	34	2.050.000	34	22.153.350	34	35.071.350	34	35.071.350	100	11,230	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
38		020803202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Terlayani (Dengan Satuan:%)	0	365.615.000	0	0	100	175.536.000	0	0	30	3.600.000	70	61.994.000	100	17.474.350	100	83.068.350	100	83.068.350	100	22,720	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
39		020803202001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	16	24.736.000	0	0	30	0	63	7.516.000	78	735.000	78	8.251.000	78	8.251.000	100	100	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
40		020803202002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Layanan)	0	365.615.000	0	0	16	150.800.000	0	0	30	3.600.000	63	54.478.000	78	16.739.350	78	74.817.350	78	74.817.350	100	20,463	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
41		020803203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan (Dengan Satuan:organisasi)	0	0	0	0	49	61.800.000	0	0	0	0	0	1.634.000	49	57.122.200	49	58.756.200	49	58.756.200	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
42		020803203002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyediaan Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	80	44.200.000	0	0	0	0	0	0	81	42.670.000	81	42.670.000	81	42.670.000	100	100	Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
43		020803203004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	17.600.000	0	0	0	0	0	1.634.000	1	14.452.200	1	16.086.200	1	16.086.200	100	100	Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	29,309		
PREDIKAT KINERJA																						ST	SR		

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat at Daerah sampai dengan Renja Perangk at Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

48	-	020807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	0,410	284.670.250	0	0	0,010	20.750.000	0,029	26.391.000	0,044	130.057.500	0,044	177.198.500	0,044	177.198.500	100	100	Bidang PPA
49		020807201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang telah mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:orang)	0	0	0	0	50	65.000.000	0	0	0	0	0	0	81	64.972.000	81	64.972.000	81	64.972.000	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
50		020807201004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan / program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	80	65.000.000	0	0	0	0	0	0	81	64.972.000	81	64.972.000	81	64.972.000	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
51		020807202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	175.470.250	0	0	0	20.750.000	85	26.391.000	100	22.415.500	100	69.556.500	100	69.556.500	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
52		020807202001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	29	24.670.250	0	0	8	1.150.000	26	500.000	36	736.500	36	2.386.500	36	2.386.500	100	100	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
53		020807202006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	30	150.800.000	0	0	8	19.600.000	26	25.891.000	36	21.679.000	36	67.170.000	36	67.170.000	100	100	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
54		020807203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapat Pelatihan (Dengan Satuan:Lembaga)	0	0	0	0	15	44.200.000	0	0	0	0	0	0	49	42.670.000	49	42.670.000	49	42.670.000	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
55		020807203006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	81	44.200.000	0	0	0	0	0	0	81	42.670.000	81	42.670.000	81	42.670.000	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	100,000		
PREDIKAT KINERJA																						ST	ST		
56	-	021304	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	42.610.000	0	0	100	22.360.000	100	9.425.000	100	10.825.000	100	42.610.000	100	42.610.000	100	100	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
57		021304201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	42.610.000	0	0	100	22.360.000	100	9.425.000	100	10.825.000	100	42.610.000	100	42.610.000	100	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
58		021304201018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	42.610.000	0	0	0	22.360.000	0	9.425.000	1	10.825.000	1	42.610.000	1	42.610.000	100	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	100,000		
PREDIKAT KINERJA																						ST	ST		

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
									I		II		III		IV										
									1	2	3	4	5	6		7							8		9
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
59		021305	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK Aktif (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	1.059.699.134	0	28.021.696	100	293.495.160	100	284.642.862	100	444.456.308	100	1.050.616.026	100	1.050.616.026	100	100	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
60		021305201	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKK Yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	1.059.699.134	0	28.021.696	100	293.495.160	100	284.642.862	100	444.456.308	100	1.050.616.026	100	1.050.616.026	100	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
61		021305201003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	0	0	0	0	252	36.967.450	0	0	0	0	117	11.700.000	252	25.067.450	252	36.767.450	252	36.767.450	100	100	Sub Koordinator Kelembagaan, Pengembangan dan Kerjasama
62		021305201006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	32.485.000	0	0	0	0	0	12.469.141	1	0	1	32.029.141	1	32.029.141	100	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
63		021305201009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	990.246.684	0	28.021.696	0	273.935.160	0	260.473.721	1	419.388.858	1	981.819.435	1	981.819.435	100	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	100,000		
PREDIKAT KINERJA																						ST	ST		

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

64		021402	P R O G R A M P E N G E N D A L I A N P E N D U D U K	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	204.220.000	0	0	0	14.536.500	100	4.830.000	100	180.505.560	100	199.872.060	100	199.872.060	100	100	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
65		021402201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	5.500.000	0	0	0	0	0	4.830.000	1	668.000	1	5.498.000	1	5.498.000	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
66		021402201023	P e l a k s a n a a n R a p a t P e n g e n d a l i a n P r o g r a m B a n g g a K e n c a n a	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (P embangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	0	0	0	1	5.500.000	0	0	0	0	0	4.830.000	1	668.000	1	5.498.000	1	5.498.000	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
67		021402202	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	198.720.000	0	0	0	14.536.500	0	0	4	179.837.560	4	194.374.060	4	194.374.060	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
68		021402202002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	14.536.500	0	0	1	14.520.500	1	29.057.000	1	29.057.000	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
69		021402202009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	1	59.338.500	1	59.338.500	1	59.338.500	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
70		021402202012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	51.600.000	0	0	0	0	0	0	1	50.743.200	1	50.743.200	1	50.743.200	100	100	Sub Koordinator Pengendalian dan Informasi Keluarga
71		021402202013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	57.120.000	0	0	0	0	0	0	1	55.235.360	1	55.235.360	1	55.235.360	100	100	Sub Koordinator Pengendalian dan Informasi Keluarga
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							ST	ST	
72	-	021403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (Dengan Satuan:%)	0	3.340.985.000	0	0	100	4.989.011.688	0	97.730.936	100	158.611.474	100	576.225.386	100	4.037.493.868	100	4.870.061.664	100	4.870.061.664	100	100	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR) (Dengan Satuan:%)	0		0		78		0		66,450		68,910		71,340		71,340		71,340		100		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15 - 19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15 - 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19) (Dengan Satuan:Kelahiran)	0		0		8,230		0		0		0		20,700		20,700		20,700		100		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) (Dengan Satuan:%)	0		0		7,620		0		7,890		6,020		5,370		5,370		5,370		100		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
73		021403201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (K I E) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	5	1.141.479.850	0	0	0	0	89.300.850	0	91.382.500	5	958.270.120	5	1.138.953.470	5	1.138.953.470	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
74		021403201001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dengan Satuan:Organisasi)	0	0	0	0	15	54.960.000	0	0	0	0	0	0	15	54.960.000	15	54.960.000	15	54.960.000	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	
75		021403201004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1	149.156.000	1	149.156.000	1	149.156.000	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	
76		021403201006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi dan Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (P embangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	10	201.250.000	0	0	0	0	0	0	10	201.250.000	10	201.250.000	10	201.250.000	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	
77		021403201008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	128.790.000	0	0	0	0	0	0	2	128.400.000	2	128.400.000	2	128.400.000	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	
78		021403201010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	606.479.850	0	0	0	0	89.300.850	0	91.382.500	1	424.504.120	1	605.187.470	1	605.187.470	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
79		021403202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB) (Dengan Satuan:Laporan)	0	316.600.000	0	0	2	980.000.000	0	0	0	0	0	0	2	977.284.000	2	977.284.000	2	977.284.000	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
80		021403202004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Dengan Satuan:Orang)	0	316.600.000	0	0	398	133.000.000	0	0	0	0	0	0	398	132.960.000	398	132.960.000	398	132.960.000	100	41,996	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
81		021403202006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (P K B / P L K B) (D e n g a n Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	847.000.000	0	0	0	0	0	0	1	844.324.000	1	844.324.000	1	844.324.000	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
82		021403203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:%)	0	2.675.505.000	0	0	18,920	2.631.901.838	0	97.730.936	0	69.310.624	0	484.842.886	15,780	1.866.322.748	15,780	2.518.207.194	15,780	2.518.207.194	100	94,121	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
83		021403203001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dengan Satuan:Laporan)	0	33.801.000	0	0	1	19.800.000	0	0	0	0	0	5.400.000	1	2.900.000	1	8.300.000	1	8.300.000	100	24,555	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

84		021403203003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:Orang)	0	273.354.000	0	0	432	1.714.053.000	0	0	0	0	432	191.627.500	432	1.437.797.500	432	1.629.425.000	432	1.629.425.000	100	100	ERNA, SKM
85		021403203006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dengan Satuan:Unit)	0	2.357.900.000	0	0	21	748.149.788	0	97.730.936	0	69.310.624	11	256.454.486	21	317.601.248	21	741.097.294	21	741.097.294	100	31,430	ERNA, SKM
86		021403203008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.450.000	0	0	1	18.900.000	0	0	0	0	0	9.700.000	1	7.550.000	1	17.250.000	1	17.250.000	100	100	Sub Koordinator Pembinaan dan Kesertaan ber-KB
87		021403203011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	130.999.050	0	0	0	0	0	21.660.900	1	100.474.000	1	122.134.900	1	122.134.900	100	100	ERNA, SKM
88		021403204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/ Kota dengan Kesertaan Rendah (Dengan Satuan:%)	0	348.880.000	0	0	55,480	235.630.000	0	0	0	0	0	0	56,610	235.617.000	56,610	235.617.000	56,610	235.617.000	100	67,535	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
89		021403204002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	3.075.000	0	0	0	0	0	0	1	3.075.000	1	3.075.000	1	3.075.000	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
90		021403204003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB (Dengan Satuan:Kampung)	0	348.880.000	0	0	23	232.555.000	0	0	0	0	0	0	23	232.542.000	23	232.542.000	23	232.542.000	100	66,654	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	100,000		
PREDIKAT KINERJA																						ST	ST		
91	-	021404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (Dengan Satuan:%)	0	4.610.370.150	0	0	100	1.280.766.000	0	0	12	57.251.000	100	0	100	1.216.992.400	100	1.274.243.400	100	1.274.243.400	100	27,639	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat at Daerah sampai dengan Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab					
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		021404	P R O G R A M PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di se tiap Kecamatan (Dengan Satuan:%)	0	4.610.370.150	0	0	100	1.280.766.000	0	0	12	57.251.000	100	0	100	1.216.992.400	100	1.274.243.400	100	1.274.243.400	100	27,639	Bidang Ke luarga Ber encana , Ketahana n dan Ke sejahtera an Kelu arga
				Cakupan Remaja Dalam Pusat Inform asi dan Konselin g Remaja/Mahasiswa (Dengan Satuan:%)	0		0		66,660		0		88		88		88		88		88		100		Bidang Ke luarga Ber encana , Ketahana n dan Ke sejahtera an Kelu arga
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (Dengan Satuan:%)	0		0		83,720		0		12		32,270		55,710		55,710		55,710		100		Bidang Ke luarga Ber encana , Ketahana n dan Ke sejahtera an Kelu arga
92		021404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keta hanan d an Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 - 49 tahun (Dengan Satuan:Rata-rata usia kawin)	0	319.882.500	0	0	21,100	360.966.000	0	0	0	57.251.000	0	0	22,200	300.145.400	22,200	357.396.400	22,200	357.396.400	100	100	Sub Koord inator Ket ahanan da n Kesejahteraan Keluarga
93		021404201002	Pengadaan Sara na Kel ompok Kegi at an Keta ha na n d a n Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan P e mbe r dayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	25	300.000.000	0	0	0	0	0	0	31	296.465.400	31	296.465.400	31	296.465.400	100	100	Sub Koord inator Ket ahanan da n Kesejahteraan Keluarga
94		021404201008	Promosi dan Sosialisasi Kegi at an Keta hanan d an Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat , Generasi Be rencana , Kelanjutusa n serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Be rencana, Kelanjutus iaan serta Pengel olaan Keuangan Kel uarga) (Dengan Satuan:Laporan)	0	319.882.500	0	0	1	60.966.000	0	0	1	57.251.000	1	0	1	3.680.000	1	60.931.000	1	60.931.000	100	19,048	Sub Koord inator Ket ahanan da n Kesejahteraan Keluarga

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

95		021404202	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melaui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang BeresikoStunting yang mendapat pendampingan dan pemantauan (Dengan Satuan:%)	0	4.290.487.650	0	0	68	919.800.000	0	0	0	0	0	83,330	916.847.000	83,330	916.847.000	83,330	916.847.000	100	21,369	Sub Koord inator Keta hanan dan Kesejahteraan Keluarga
96		021404202005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin /kelahiran, Baduta /Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin /kelahiran, Baduta /Balita) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	438.000.000	0	0	0	0	0	1	435.047.000	1	435.047.000	1	435.047.000	100	100	Sub Koord inator Keta hanan dan Kesejahteraan Keluarga
97		021404202006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin /kelahiran, Baduta /Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin /kelahiran, Baduta /Balita) yang mendapat p end ampi ngan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	481.800.000	0	0	0	0	0	1	481.800.000	1	481.800.000	1	481.800.000	100	100	Sub Koord inator Keta hanan dan Kesejahteraan Keluarga
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	27,639	
PREDIKAT KINERJA																						ST	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																						100,000	79,229	
PREDIKAT KINERJA																						ST	T	

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan KB Kota Pangkalpinang Tahun 2025 TRIWULAN I**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	020801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	69	4.540.358.367	72,25	-		0		0		0	72	0	105	0	Sekretariat
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90									0		0		Sekretariat	
10			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3.522.548.575	25							25	0	25	0	Sub Koordinator Keuangan	
11			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	30	3.522.548.575	30	1.101.092.702						30	1.101.092.702	100	31	Sub Koordinator Keuangan	
10			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	10	0								0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Keuangan	
11			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:paket)	1	0		-						0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Keuangan	
14			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	161.937.000	25							25	0	25	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
15		020801206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12.149.500	1	6.597.000						1	6.597.000	100	54	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
16		020801206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	0	-	-						0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	0	-	-						0	0	0	#DIV/0!		
17		020801206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	66.989.500	2	35.987.606						2	35.987.606	40	54	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
18		020801206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	32.339.000	-	-						0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

19		020801206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	50.459.000	-	2.460.000						0	2.460.000	0	5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerahh (Dengan Satuan:%)	100	0								0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:unit)	31	0	-	-						0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:unit)	1	0	-	-						0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20		020801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	758.064.096	25							25	0	25	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22		020801208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	130.000.000	1	15.481.567						1	15.481.567	25	12	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
23		020801208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	628.064.096	1	121.965.400						1	121.965.400	25	19	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
24		020801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	97.808.696	25							25	0	25	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
25		020801209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	52.390.696	1	15.348.616						1	15.348.616	100	29	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
26		020801209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	21.959.000	2	8.020.000						2	8.020.000	100	37	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
27		020801209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	68	23.459.000	23	7.400.000						23	7.400.000	34	32	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
28		020801209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	0	-	-						0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																52,355	0,000	
PREDIKAT KINERJA																R	SR	

29	-	020802	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD (Dengan Satuan:%)	2,43	19.914.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang PPA
30		020802201	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Program PUG Pada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:program)	14	17.964.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
31		020802201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	17.964.000	-	-				0	0	0	0	0	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
32		020802202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	1.950.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
33		020802202002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Organisasi)	30	1.950.000	-	-				0	0	0	0	0	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															0,000	0,000	
PREDIKAT KINERJA															SR	SR	
34	-	020803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) (Dengan Satuan:Rasio)	13,460	349.888.000	15,87	87.988.673	0	0	0	16	87.988.673	84,10	25		Bidang PPA
35		020803201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Dengan Satuan:Media)	2	82.624.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
37			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	65.000.000	-	-				0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	34	17.624.000	-	-				0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

38		020803202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Terlayani (Dengan Satuan:%)	100	160.805.000	100	5.391.303	0	0	0	100	5.391.303	100	3	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
39		020803202001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Dengan Satuan:Orang)	10	0	-	-	-	-	-	0	0	0	#DIV/0!	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Layanan)	20	160.805.000	19	5.391.303	-	-	-	19	5.391.303	95	3	
41		020803203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan (Dengan Satuan:organisasi)	20	106.459.000	20	82.597.370	0	0	0	20	82.597.370	100	78	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
43			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Dengan Satuan:Orang)	150	88.400.000	150	82.597.370	-	-	-	150	82.597.370	100	93	Sub Koordinator Pembedayaan Perempuan
43			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	1	18.059.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Sub Koordinator Pembedayaan Perempuan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														84,100	25,148	
PREDIKAT KINERJA														T	SR	
29	-		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG (Dengan Satuan:%)	40,00	0										Bidang PPA
30			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)		0										Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
31			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	-	-	-	-	-					Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																
PREDIKAT KINERJA														SR	SR	

44	-	020806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar (Dengan Satuan:%)	34	35.700.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang PPA
45		020806201	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak (Dengan Satuan:Lembaga)	25	35.700.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Anak
46		020806201001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Dengan Satuan:Organisasi)	20	6.450.000	-	-				0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Anak
47		020806201002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	29.250.000	-	-				0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Anak
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0,000	0,000	
PREDIKAT KINERJA																SR	SR	
48	-	020807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:%)	0,39	203.035.000	0,023					0	0	6	0			Bidang PPA
51			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang Telah Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	70	65.000.000	-	-				0	0	0	0			Sub Koordinator Perlindungan Anak
52			Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM Yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA (Dengan Satuan:Orang)	70	65.000.000	-	-				0	0	0	0			Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
51		020807202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani (Dengan Satuan:%)	100	138.035.000	100					100	0	100	0			Sub Koordinator Perlindungan Anak
52		020807202001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Dengan Satuan:Orang)	10	0	-					0	0	0	0	#DIV/0!		Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
52			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK Yang Mendapatkan Layanan (Dengan Satuan:Orang)	32	138.035.000	15	9.498.145				15	9.498.145	47	7			Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					5,897		
PREDIKAT KINERJA					SR		

56	-	021304	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik (Dengan Satuan:%)	100	25.000.000	-	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000	0	44	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
57		021304201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (Dengan Satuan:%)	100	25.000.000	-	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000	0	44	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
58		021304201018	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	25.000.000	-	11.000.000					0	11.000.000	0	44	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															0,000	44,000	
PREDIKAT KINERJA															SR	SR	
59	-	021305	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK Aktif (Dengan Satuan:%)	100	355.086.784	-	57.079.464	0	0	0	0	0	57.079.464	0	16	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
60		021305201	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan (Dengan Satuan:%)	100	355.086.784	-	57.079.464	0	0	0	0	0	57.079.464	0	16	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
61		021305201003	Peningkatan Kapasitas Kelmabagan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	252	30.000.000	-	7.500.000					0	7.500.000	0	25	Sub Koordinator Kel em b a g a a n , Perkembangan dan Kerjasama
62		021305201006	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.000.000	-	315.000					0	315.000	0	1	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
63		021305201009	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	1	300.086.784	-	49.264.464					0	49.264.464	0	16	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															0,000	16,075	
PREDIKAT KINERJA															SR	SR	

64	-	021402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100	235.514.000	-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
67		021402202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota (Dengan Satuan:Laporan)	3	235.514.000	-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
70			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	1	65.574.000	-	-					0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	1	104.630.000	-	-					0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dengan Satuan:Dokumen)	1	65.310.000	-	1.000.000					0	1.000.000	0	2	0	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0,000	0,425	
PREDIKAT KINERJA																SR	SR	
72	-	021403	PROGRAM PEMBINAAN K E L U A R G A BERENCANA (KB)	Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (Dengan Satuan:%)	100	1.487.160.000	100	69.630.000	0	0	0	0	100	69.630.000	100	5	0	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) (Dengan Satuan:%)	7,6		5						5		60		0	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR) (Dengan Satuan:%)	78,20		70						70		89		0	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Dengan Satuan:kelahiran per 1000 WUS)	8,2								0		0		0	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
73		021403201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	4	583.830.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
78		021403201010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Laporan)	1	212.840.000	-	-					0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dengan Satuan:Laporan)	1	140.700.000	-	-						0	0	0	0	
			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	1	109.850.000	-	-						0	0	0	0	
			Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi Yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dengan Satuan:Organisasi)	10	120.440.000	-	-						0	0	0	0	
79		021403202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (Dengan Satuan:Laporan)	2	149.205.000	-	60.835.000		0			0	0	60.835.000	0	41	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
80			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Dengan Satuan:Orang)	398	119.335.000	398	37.120.000						398	37.120.000	100	31	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
			Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Dengan Satuan:Organisasi)	7	29.870.000	7	23.715.000						7	23.715.000	100	79	
82		021403203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:%)	18,97	551.171.000	22	8.795.000		0			0	22	8.795.000	118	2	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
83			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.740.000	-	-						0	0	0	0	

			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:Orang)	811	489.501.000	300	1.200.000						300	1.200.000	37	0	
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.935.000	-	-						0	0	0	0	
		021403203001	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak(Dengan Satuan:Laporan)	1	9.995.000	-	7.595.000						0	7.595.000	0	76	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
88		021403204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah (Dengan Satuan:%)	55,58	202.954.000		-		0		0		0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
90		021403204003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Kampung)	42	202.954.000	-	-						0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																62,342	4,682	
PREDIKAT KINERJA																R	SR	

91	-	021404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan (Dengan Satuan:%)	100	2.381.995.000	100	50.130.000			0		0		0	100	50.130.000	100	2,105	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Dengan Satuan:%)	69,04		90,47									90		131		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (Dengan Satuan:%)	83,74		45,83									46		55		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
92		021404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun (Dengan Satuan:Rata-rata usia kawin)	21,2	2.381.995.000	-	50.130.000			0		0		0	0	50.130.000	0	2	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
94		021404201008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Dengan Satuan:Laporan)	1	50.130.000	1	50.130.000								1	50.130.000	100	100	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Dengan Satuan:Laporan)	1	70.000.000	-	-								0	0	0	0	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS (Dengan Satuan:Laporan)	1	230.665.000	-	-								0	0	0	0	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Dengan Satuan:Unit)	8	104.000.000	-	-								0	0	0	0	

			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang Beresiko Stunting yang Mendapat Pendampingan dan Pemantauan (Dengan Satuan: %)	69	963.600.000	-	-						0	0	0	0	
			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (Dengan Satuan:Laporan)	1	438.000.000	-	-						0	0	0	0	
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang Mendapat Pendampingan (Dengan Satuan:Laporan)	1	525.600.000	-	-						0	0	0	0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																95,256	2,105	
PREDIKAT KINERJA																ST	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																29,995	10,270	
PREDIKAT KINERJA																SR	SR	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sesuai tabel berikut ini :

A. Capaian Kinerja 2024

Capaian Indikator Sasaran IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	2.	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	20%	33,23%	166,15%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	3.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,014%	0,066%	<50%
4.	Meningkatnya nilai KLA	4.	Predikat Kota Layak Anak	701-800 (Nindya) Predikat	Masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian PPA	
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	5.	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2 Rata-Rata Anak per Wanita	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita	87,5%

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang. Dimana Perjanjian Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya untuk mengetahui celah kinerja.

Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024 akan disajikan dalam capaian Indikator Kinerja dengan cara perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Berdasarkan perbandingan antara tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Realisasi 2023		Realisasi 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	-	-	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	-	-	20%	33,23%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	-	0,042%	0,014%	0,066%
4.	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	-	670 (Madya)	701-800 (Nindya) Predikat	Masih menunggu hasil penialain dari Kementerian
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	-	2,26 Rata-Rata Anak per Wanita	2 Rata-Rata Anak per Wanita	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita

Target tidak diisi karena adanya perbedaan indikator Sasaran antara Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Semua Indikator Sasaran Strategisnya berbeda. Sehingga hanya diisi realisasi sesuai dengan data yang ada pada bidang terkait.

2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel Perbandingan Kinerja dalam beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	-	-	-	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	-	-	-	33,23%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,015%	0,028%	0,042%	0,066%
4.	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	635 (Madya)	686 (Madya)	690 (Madya)	Masih menunggu hasil penialain dari Kementerian
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2 Rata-Rata Anak per Wanita	1,98 Rata-Rata Anak per Wanita	2,26 Rata-Rata Anak per Wanita	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita

3. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	33,23%	35%	38%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,066%	0,013	0,012
4.	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	Masih menunggu hasil penialain dari Kementerian	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita	2 Rata-Rata Anak per Wanita	2 Rata-Rata Anak per Wanita

4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

1) Sasaran : Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

A. Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Perhatian penuh dari pimpinan sehingga untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan rutin dilaksanakan sampai berjenjang di tingkat terbawah mulai dari RT/RW
2. Adanya stimulan untuk Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan yang aktif melalui anggaran yang mendukung dalam kegiatan tersebut.
3. Pelaksanaan lomba-lomba yang berjenjang dari Tingkat Kota sampai Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengaktifkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap tahunnya untuk melihat keberlangsungan keaktifan Lembaga Kemasyarakatan tersebut.
5. Apresiasi untuk bagi kader yang berprestasi.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan

1. Letak Demografis sebagian kecamatan daerah perkotaan sehingga perlu inovasi yang baik untuk membuat keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan tersebut.
2. Perlu perhatian yang intens dari pimpinan untuk keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

C. Strategi atau Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Hal Tersebut

1. Pelaksanaan lomba untuk inovasi dalam mengaktifkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
2. Reward untuk apresiasi kepada kader yang berprestasi.
3. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan kerjasama lintas sektoral dalam mendukung keaktifan kader kelembagaan tersebut.
4. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kader dan manfaat dapat langsung dirasakan kader.

5. Kebijakan pimpinan yang dikeluarkan sangat mendukung dalam keaktifan Lembaga Kemasyarakatan.
6. Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan keaktifan Lembaga Kemasyarakatan.

D. Upaya yang Dilakukan Ke Depan

1. Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan pembinaan dan kegiatan dalam mengaktifkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
2. Apresiasi atau reward kepada kader yang ada di tingkat bawah.

2) Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

A. Faktor Pendukung Keberhasilan diantaranya adalah :

1. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga, masyarakat, pemerintahan dan dunia usaha.
2. Penguatan kebijakan yang melindungi hak perempuan untuk bisa terlibat di dalam Lembaga Pemerintahan.
3. Komitmen dan kerjasama dari semua pihak.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah :

1. Adanya stigma di masyarakat yang menganggap remeh tenaga perempuan.
2. Kurangnya dukungan kebijakan yang kuat.
3. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

C. Strategi atau Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Hal Tersebut

1. Memberikan KIE kepada masyarakat terkait pentingnya mewujudkan kesetaraan gender.
2. Memberikan Advokasi kepada pengambil pemangku/pengambil kebijakan agar memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi pada Lembaga Pemerintahan.

D. Upaya yang Dilakukan Kedepan

Upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah :

- Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.

3) Sasaran : Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

A. Faktor Pendukung Keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.
2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan penggunaan teknologi.
3. Meningkatnya Literasi Digital oleh masyarakat.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah :

1. Pengaruh dari teknologi

Adanya kemajuan teknologi berdampak sangat besar terhadap peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan. Penggunaan Telpon Seluler secara tidak terbatas yang memungkinkan kita bebas mengakses apa saja yang memungkinkan kita mencontoh perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan.

2. Literasi Digital

Kurangnya Literasi Digital oleh sebagian masyarakat kita secara tidak langsung bisa meningkatkan kekerasan terhadap perempuan.

3. Kurang massifnya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terhadap masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan

Pergeseran stigma oleh sebagian masyarakat kita yang menjadi korban kekerasan, dimana mereka menganggap menjadi korban kekerasan adalah aib keluarga yang harus ditutupi.

C. Strategi atau Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Hal Tersebut

3. Rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan.
4. Advokasi kebijakan dan Layanan kekerasan terhadap Perempuan.
5. Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan korban kekerasan.
6. Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Penyedia Korban Kekerasan.
7. Diseminasi informasi terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

D. Upaya yang Dilakukan Kedepan

Upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah :

1. Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk Penyebarluasan Informasi terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Layanan Perlindungan Perempuan.
2. Menyusun MOU atau PKS dengan Dinas Instansi, Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi dan lain-lain terkait Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan.
3. Melakukan sosialisasi ke Lembaga Masyarakat (TP PKK kecamatan dan Kelurahan) terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan).
4. Penyuluhan Literasi Digital kepada Lembaga Masyarakat kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Membuat Nota Kesepatan Lintas instansi dalam rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.

4) Sasaran : Meningkatnya Nilai KLA

A. Faktor Pendukung Keberhasilan dalam pencapaian meningkatnya Nilai KLA (Predikat Kota Layak Anak) diantaranya adalah :

1. Komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
2. Kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.
3. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.
4. Partisipasi anak dalam pengambilan keputusan.

- B. Faktor Penghambat Keberhasilan dalam dalam pencapaian meningkatnya Nilai KLA (Predikat Kota Layak Anak) diantaranya adalah :
1. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tempat bermain ramah anak.
 2. Kurangnya komitmen lintas sektor dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak.
 3. Belum dipahaminya hak-hak anak.
- C. Strategi atau Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Hal Tersebut
1. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bisa berbentuk kebijakan.
 2. Setiap proses pembangunan yang dilakukan harus mengintegrasikan seluruh hak-hak anak ke dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.
 3. Pengembangan inovasi pemerintah khususnya dalam mengakselerasi program Kota Layak Anak.
- D. Upaya yang Dilakukan Kedepan
- Upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah :
1. Komitmen kuat bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
 2. Peran lintas sektor diperlukan dalam pemenuhan hak anak.
 3. Melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai pentingnya pemenuhan hak anak.

5) Sasaran : Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang

- A. Faktor Pendukung Keberhasilan dalam pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun) diantaranya adalah :
1. Penguatan pengetahuan masyarakat tentang KB.
 2. Sosialisasi Program KB melalui berbagai media seperti keluarga, tetangga, organisasi masyarakat serta media massa.
 3. Dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah.
 4. Partisipasi masyarakat.
 5. Layanan konseling.
 6. Dukungan suami.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan dalam dalam pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun) diantaranya adalah :

1. Rendahnya literasi masyarakat dikarenakan masyarakat belum mamahami konsep berkeluarga dan Program KB.
2. Mitos dan kesalahan pemahaman dalam ber-KB.
3. Kurangnya sosialisasi, kurangnya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang pelayanan kontrasepsi.
4. Pandangan masyarakat.
5. Kurangnya peran Tokoh Agama dalam mendukung Program KB.

C. Strategi atau Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Hal Tersebut

1. Melakukan penyuluhan.
2. Melakukan pelayanan KB.
3. Pelatihan.
4. Sosialisasi.
5. Promosi KB.
6. Program Bina Keluarga Remaja (BKR).
7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
8. MOU (kerjasama) dengan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat.
9. Inovasi

D. Upaya yang Dilakukan Kedepan

Upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah :

1. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga.
2. Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan mitra kerja.
3. Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan.
4. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB.
5. Pelaksanaan mekanisme operasional Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok).
6. Koordinasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan.

7. Pembinaan pelayanan KB di fasilitas kesehatan.
 8. Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
 9. Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja;

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024, ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

Target dan Realisasi Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan realisasi 100%. Dimana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sudah aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera yaitu :

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2) Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

Target dan Realisasi Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	20%	33,23%	166,15%

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan yaitu :

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pengarusutamaan Gender	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3) Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Target dan Realisasi Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,014%	0,066%	<50%

Untuk Indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase capaian kinerja untuk indikator ini masih kurang dari 50%. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain kegiatan pencegahan kekerasan, penyediaan layanan dan penguatan lembaga-lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan akan tetapi hasilnya belum maksimal.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu :

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

4) Predikat Kota Layak Anak

Target dan Realisasi Predikat Kota Layak Anak

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Predikat Kota Layak Anak	701-800 (Nindya) Predikat	Masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian PPPA	-

Untuk Indikator Predikat Kota Layak Anak masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian PPPA. Upaya-upaya telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan data-data yang dibutuhkan untuk penilaian telah diinput pada Aplikasi dari Kementerian PPPA sehingga saat ini hanya menunggu nilai KLA keluar. Biasanya nilai KLA akan diumumkan pada Bulan Juli pada saat Hari Anak Nasional.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Predikat Kota Layak Anak yaitu :

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Predikat Kota Layak Anak

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
2.	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan / program/ kegiatan pencegahan KTA
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kota

5) Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun

Target dan Realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2 Rata-Rata Anak per Wanita	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita	87,5%

Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 2 Rata-Rata Anak per Wanita realisasi nya 2.25 Rata-Rata Anak per Wanita dengan persentase capaian kinerja 87,5%.

Dalam rangka mencapai kinerja ini, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana sudah dilaksanakan kepada masyarakat melalui Media Mass Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang. Selain itu Penyuluh Keluarga Berencana(PKB)/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta para Kader PPKBD dan Sub PPKBD sudah bekerja dilapangan akan tetapi hasilnya masih belum maksimal sehingga belum mencapai target.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun yaitu:

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Predikat Kota Layak Anak

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
			Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Dukungan Operasional

			Pelayanan KB Bergerak
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program BanggaKencana di Kampung Keluarga Berkualitas
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

2.3 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan di dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, dalam hal ini untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas

pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengintegrasian kajian berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang secara umum dan dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu pada hasil telaahan terhadap RPD Kota Pangkalpinang 2024-2026, Renstra Kementerian/Lembaga, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II Gambaran Pelayanan PD, dapatlah disusun isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun mendatang.

Pada sub ini akan diuraikan identifikasi permasalahan yang harus dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Lembaga yang melaksanakan PPRG dan anggaran berbasis gender di Kota Pangkalpinang.
2. Masih kurangnya pegawai terutama pada UPTD PPPA.
3. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatnya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19).
5. Belum Optimalnya Capaian Penggunaan Metode Kontrasepsi semua cara.
6. Meningkatnya Angka Total Fertility Rate (TFR).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada beberapa Sub Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dilakukan penyesuaian.

Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31. dibawah ini.

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kota pangkalpinang

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota		Indeks kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95 Nilai	5.009.672.969	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota		Indeks kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95 Nilai	5.009.672.969	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72.35 Nilai				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72.35 Nilai		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	100%	3.911.383.289	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	100%	3.911.383.289	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	3.911.383.289	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	3.911.383.289	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	108.574.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	108.574.800	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	38.346.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	38.346.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.769.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.769.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.459.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.459.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pk. Pinang	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	835.187.880	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pk. Pinang	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	835.187.880	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	105.459.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	105.459.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	729.728.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	729.728.880	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	154.527.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	154.527.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.459.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.459.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Pk. Pinang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan	11 Unit	86.959.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Pk. Pinang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan	11 Unit	86.959.000	

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	37.109.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	37.109.000	
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah Pada APBD	2,46%	50.000.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah Pada APBD	2,46%	50.000.000	
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah Program PUG Pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis Gender Tingkat Kabupaten/ Kota	15 program	20.000.000	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah Program PUG Pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis Gender Tingkat Kabupaten/ Kota	15 program	20.000.000	
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	35 Lembaga	20.000.000	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	35 Lembaga	20.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Pk. Pinang	Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100%		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakata	Pk. Pinang	Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	100%		

	Kemasyarakata Kewenangan Kabupaten/Kota		pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kewenangan Kabupaten/Kota		Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pk. Pinang	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30 Lembaga	10.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pk. Pinang	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30 Lembaga	10.000.000	
	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50 Orang	20.000.000	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50 Orang	20.000.000	
III	Program Perlindungan Perempuan		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000	12,56 rasio	20.000.000	Program Perlindungan Perempuan		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000	12,56 rasio	20.000.000	

			penduduk perempuan)					penduduk perempuan)			
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2 Media	20.000.000	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2 Media	20.000.000	
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	20 Lembaga	20.000.000	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	20 Lembaga	20.000.000	
IV	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar	38%	22.370.000	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar	38%	22.370.000	

	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah Lembaga yang telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak	30 Lembaga	22.370.000	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah Lembaga yang telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak	30 Lembaga	22.370.000	
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Lembaga	22.370.000	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Lembaga	22.370.000	
V	Program Perlindungan Khusus Anak		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	0,044%	58.199.950	Program Perlindungan Khusus Anak		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	0,044%	58.199.950	
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Pk. Pinang	Persentase pengambil kebijakan dan	100%	19.999.950	Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Pk. Pinang	Persentase pengambil kebijakan dan	100%	19.999.950	

	Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		pemangku kepentingan yang telah mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA			Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		pemangku kepentingan yang telah mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA			
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	19.999.950	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	19.999.950	
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	100 %	38.200.000	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	100 %	38.200.000	
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Pk. Pinang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	38.200.000	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat	10 orang	38.200.000	

	Kabupaten/Kota							Kabupaten/Kota			
VI	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase LKK Aktif	100%	128.199.500	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase LKK Aktif	100%	128.199.500	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	100%	128.199.500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	100%	128.199.500	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pk. Pinang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 Lembaga	28.199.500	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pk. Pinang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 Lembaga	28.199.500	
	Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	100.000.000	Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	100.000.000	
VII	Program Pengendalian Penduduk		Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan	100%	18.275.000	Program Pengendalian Penduduk		Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan	100%	18.275.000	
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	18.275.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	18.275.000	

	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	18.275.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	18.275.000	
VIII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,17 kelahiran per 1000 WUS	126.800.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,17 kelahiran per 1000 WUS	126.800.000	
			Cakupan PKB/PLKB yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100%				Cakupan PKB/PLKB yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100%		
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	78,40%				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	78,40%		
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	5,37%				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	5,37%		

	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	11.875.000	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	11.875.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	11.875.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	11.875.000	
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 laporan	24.975.000	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 laporan	24.975.000	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	7 organisasi	24.975.000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	7 organisasi	24.975.000	

			dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,02 %	39.950.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,02 %	39.950.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	19.950.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	19.950.000	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	20.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	20.000.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi		Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/ Kota dengan	55,68%	50.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi		Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/Kota	55,68%	50.000.000	

	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Kesertaan Rendah			Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		dengan Kesertaan Rendah			
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Pk. Pinang	Jumlah DASHAT di Kampung KB	1 Unit	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Pk. Pinang	Jumlah DASHAT di Kampung KB	1 Unit	50.000.000	
X	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	100%	81.800.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	100%	81.800.000	
			Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	88%				Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	88%		
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	83,76%				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	83,76%		

	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun	21,3 rata-rata usia kawin	81.800.000	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun	21,3 rata-rata usia kawin	81.800.000	
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pk. Pinang	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan/ Dokumen	30.000.000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pk. Pinang	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan/ Dokumen	30.000.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA))	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	25.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA))	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	25.000.000	

	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	7 Kelompok	26.800.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	7 Kelompok	26.800.000	
				TOTAL	5.515.317.419				TOTAL	5.515.317.419	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN 2025 – 2029, telah ditetapkan Visi Presiden terpilih yaitu :

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk mencapai visi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mencanangkan delapan misi yang disebut astacita. Sesuai dengan namanya, astacita terdiri atas delapan pokok haluan antara lain :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Keduanya meyakini bahwa Pancasila, demokrasi, dan HAM secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis untuk menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Menurut Prabowo-Gibran, negara yang kuat ialah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan yang baik serta dapat melindungi dan menjamin kedamaian.

Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Untuk itu, Prabowo-Gibran meyakini Indonesia perlu fokus pada swasembada dalam berbagai sektor krusial, mencakup pangan, energi, air, dan ekonomi kreatif.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Prabowo-Gibran memandang bahwa keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk penyediaan pekerjaan yang layak.

Selain itu, inovasi juga dipandang perlu dalam pengembangan industri kreatif nasional. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya Indonesia, industri kreatif berpotensi menjadi pendorong utama roda ekonomi sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terencana diyakini Prabowo-Gibran dapat memperkuat jaringan dan mobilitas, sekaligus menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan di berbagai sektor, dan memastikan kesempatan yang adil bagi setiap warga.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Pembangunan bangsa yang berkualitas terletak pada kemajuan warganya. Dengan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, Prabowo-Gibran yakin Indonesia dapat membangun dasar yang kuat untuk generasi mendatang.

Keduanya juga menaruh perhatian terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, generasi muda, serta penyandang disabilitas. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang inklusif.

Atas dasar itu, Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dari sisi pendidikan dan kesehatan, serta inklusif terhadap perempuan, kaum muda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat merupakan fokus Prabowo-Gibran. Hilirisasi dan industrialisasi dipilih menjadi salah satu cara dalam pemaksimalan tersebut.

Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi. Tidak hanya itu, cara ini juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Dalam 5 tahun ke depan, Prabowo-Gibran ingin menjaga keseimbangan pengembangan di setiap wilayah yang dimulai dari komunitas desa. Peran esensial komunitas desa akan dimanfaatkan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, membangun dari desa juga dilakukan dalam bentuk pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kemudahan akses ke berbagai sumber daya.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Korupsi dan narkoba perlu dicegah dan ditanggulangi dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Oleh sebab itu, Prabowo-Gibran bertekad untuk melakukan reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Selama 5 tahun ke depan, Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan jaminan keamanan beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya.

Dengan pendekatan holistik ini, Prabowo-Gibran ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, berkesempatan sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam membangun masa depan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendukung ASTACITA point ke 4 yaitu :

“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

3.2 Telaah terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
2. Meningkatnya Pembangunan Keluarga
Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga
3. Mewujudkan Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik
Indikator : Persentase Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Sasasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
Indikator : Persentase Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
2. Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
Indikator : Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
3. Meningkatnya Nilai KLA
Indikator : Predikat Kota Layak Anak
4. Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang
Indikator : Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun
5. Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera
Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026**

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
Mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia			
	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender			
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender
				Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan
				Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
				Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
			Meningkatnya pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga
				Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju tercapainya good governance		Indeks Reformasi Birokrasi			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik		Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik
				Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, seperti yang tergambarkan pada tabel berikut:

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pangkalpinang
Tahun 2024 – 2026**

Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Definisi Operasional
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	
Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan	Jumlah pekerja perempuan di Lembaga pemerintahan dibagi jumlah pekerja perempuan dikali 100
Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Jumlah korban perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100
Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	
Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	
Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun	
Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	Jumlah kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tahun berkenaan dibagi jumlah total kelurahan dikali 100
Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah kelurahan dengan Lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera dibagi jumlah total kelurahan dikali 100

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setiap tahunnya.

Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TC. 32

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Beserta Target Capaian Kinerja Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2026	Keterangan
Meningkatnya pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	61,49	
	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan	%	34	Target 2026 pada Renstra 24%, akan tetapi capaian pada akhir tahun 2024 33,23% sehingga untuk Tahun 2026 ditargetkan 34%
	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,012	
	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya (701-800)	
Meningkatnya pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57	
	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per-wanita	2	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2026	Keterangan
Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik		Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	%	100	
	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	%	100	

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan :

- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

- 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan :

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan :

- 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada pengambil Kebijakan dan Pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 2) Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Layanan Pendampingan Korban Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.

6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
 - b. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

7. Pengendalian Penduduk

Kegiatan :

- 1) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.

8. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal:

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana.

- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.

- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- a. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - b. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- a. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas.

9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
- b. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)).
- c. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2026 terlampir dalam Tabel T-C.33. di bawah ini.

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana dan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah		95 Nilai	5.009.672.969			96 Nilai	5.510.640.265
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		72,35 Nilai				72,55	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP		100%	3.119.383.289			100%	3.431.321.617
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	30 Orang/ Bulan	3.119.383.289	PAD		35 Orang/Bulan	3.431.321.617

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pk.Pinang	100%	108.574.800			100%	119.432.280
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pk. Pinang	1 Paket	8.000.000	PAD		1 Paket	8.800.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pk. Pinang	7 Paket	38.346.800	PAD		10 Paket	42.181.480
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pk. Pinang	1 Paket	11.769.000	PAD		2 Paket	12.945.900
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	1 Laporan	50.459.000	PAD		1 Laporan	55.504.900

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pk. Pinang	100%	835.187.880			100%	918.706.668
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pk. Pinang	4 Laporan	105.459.000	PAD		4 Laporan	116.004.900
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pk. Pinang	4 Laporan	729.728.880	PAD		4 Laporan	802.701.768
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Pk. Pinang	100%	154.527.000			100%	169.979.700
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Pk. Pinang	1 Unit	30.459.000			1 Unit	33.504.900

	Dinas Jabatan	Pajaknya							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pk. Pinang	11 Unit	86.959.000	PAD		15 Unit	95.654.900
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pk. Pinang	89 Unit	37.109.000	PAD		93 Unit	40.819.900
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD	Pk. Pinang	2,46%	50.000.000			2,48%	55.000.000
	Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Program PUG Pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	15 program	20.000.000			16 program	22.000.000

	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Pk. Pinang	35 Lembaga	20.000.000	PAD		35 Lembaga	22.000.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	100 %	30.000.000				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Pk. Pinang	30 Lembaga	10.000.000	PAD		30 Lembaga	11.000.000

	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Pk. Pinang	50 Orang	20.000.000	PAD		55 Orang	22.000.000
III	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Pk. Pinang	12.56 rasio	20.000.000			12,46 Rasio	22.000.000
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Pk. Pinang	2 Media	20.000.000			2 Media	22.000.000

	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Pk. Pinang	20 Lembaga	20.000.000	PAD		25 Lembaga	22.000.000
IV	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar	Pk. Pinang	38%	22.370.000			40%	24.607.000
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga yang Telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak	Pk. Pinang	30 lembaga	22.370.000			30 lembaga	24.607.000
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan	Pk. Pinang	27 Lembaga	22.370.000	PAD		30 Lembaga	24.607.000

	Lembaga Perintahan, Non Pemintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
V	Program Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Pk. Pinang	0,044 %	58.199.950			0,042%	64.019.945
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang telah mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA	Pk. Pinang	100%	19.999.950			100%	21.999.945
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi	Pk. Pinang	1 Kegiatan	19.999.950	PAD		1 Kegiatan	21.999.945

	Kewenangan Kabupaten/Kota	pencegahan KtA tingkatKab/Kota							
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	Pk. Pinang	100 %	38.200.000			100 %	42.020.000
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	10 Orang	38.200.000	PAD		15 Orang	42.020.000
VI	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKK Aktif	Pk. Pinang	100%	128.199.500			100%	220.095.462

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupate/Kota	Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	Pk. Pinang	100%	128.199.500			100%	141.019.450
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pk. Pinang	252 Lembaga	28.199.500	PAD		252 Lembaga	31.019.450

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pk. Pinang	1 dokumen	100.000.000	PAD		1 dokumen	110.0000.000
VII	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan	Pk. Pinang	100%	18.275.000			100%	20.102.500
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	1 laporan	18.275.000			1 laporan	20.102.500
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pk. Pinang	1 laporan	18.275.000	PAD		1 laporan	20.102.500
VIII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Pk.Pinang	8.17 kelahiran per 1000 WUS	126.800.000			8,16 kelahiran per1000 WUS	139.480.000

		Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Pk.Pinang	100%				100%	
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR)	Pk. Pinang	78,40%				78,60%	
		Persentase Kebutuhan Ber- KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	Pk. Pinang	5,37%				5,35%	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pk. Pinang	1 Laporan	11.875.000			1 Laporan	13.062.500

	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pk. Pinang	1 Laporan	11.875.000	PAD		1 Laporan	13.062.500
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pk. Pinang	1 laporan	24.975.000			1 laporan	27.472.500
	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pk. Pinang	7 organisasi	24.975.000	PAD		7 organisasi	27.472.500
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pk. Pinang	19,02 %	39.950.000			19,04 %	43.945.000

	Daerah Kabupaten/Kota								
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pk. Pinang	1 Laporan	19.950.000	PAD		1 Laporan	21.945.000
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pk. Pinang	1 Laporan	20.000.000	PAD		1 Laporan	22.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah	Pk. Pinang	55,68%	50.000.000			55,70%	55.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Pk.Pinang	1 Unit	50.000.000	PAD		1 Unit	55.000.000

	Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas								
IX	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Pk.Pinang	83.76%	81.800.000			83.80%	89.980.000
		Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	Pk.Pinang	100%				100%	
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	Pk.Pinang	88%				90%	
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 tahun	Pk. Pinang	21,3 Rata-Rata Usia Kawin	81.800.000			21,3	89.980.000
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui	Pk. Pinang	1 Laporan / Dokumen	30.000.000	PAD		1 Laporan / Dokumen	33.000.000

	Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pk. Pinang	1 Laporan	25.000.000	PAD		1 Laporan	27.500.000
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	Pk. Pinang	7 Kelompok	26.800.000	PAD		7 Kelompok	29.480.000

		Ekonomi Keluarga) yang dibentuk							
JUMLAH					5.515.317.419				6.145.925.172

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metode pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen Renja dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.
2. Merumuskan keluaran/output serta metode pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.
3. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metode dan jadwal pelaksanaan.

Pengumpulan Data dan Informasi Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Informasi pagu indikatif bagi setiap Perangkat Daerah dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan kepada Perangkat Daerah. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Pagu indikatif Perangkat Daerah dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah maupun dalam pelaksanaan musrenbang, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

Dari langkah-langkah diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah menyiapkan Rencana Kerja tahun 2026 seperti tabel T-C.34 berikut.

Tabel T-C.34

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2026**

No	Prioritas Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Organisasi	Jumlah Plafond
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95 Nilai	DPPPAKB	5.009.672.969
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,35 Nilai	DPPPAKB	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	DPPPAKB	3.911.383.289
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	DPPPAKB	3.911.383.289
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	DPPPAKB	108.574.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	DPPPAKB	8.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	DPPPAKB	38.346.800

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	DPPPAKB	11.769.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	DPPPAKB	50.459.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	DPPPAKB	835.187.880
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	DPPPAKB	105.459.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	DPPPAKB	729.728.880
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	DPPPAKB	154.527.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	DPPPAKB	30.459.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	DPPPAKB	86.959.000

	Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	DPPPAKB	37.109.000
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Persentase ARG pada belanja langsung	Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD	2,46%	DPPPAKB	50.000.000
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Program PUG Pada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/Kota	15 program	DPPPAKB	20.000.000
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	35 Lembaga	DPPPAKB	20.000.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	DPPPAKB	30.000.000

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30 Lembaga	DPPPAKB	10.000.000
	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50 Orang	DPPPAKB	20.000.000
III	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	12,56 rasio	DPPPAKB	20.000.000
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2 Media	DPPPAKB	20.000.000

	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	20 Lembaga	DPPPAKB	20.000.000
IV	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terwujudnya Kota yang Memenuhi Hak-Hak Anak	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar	38%	DPPPAKB	22.370.000
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak	30 Lembaga	DPPPAKB	22.370.000
	Advokasi Kebijakan dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Lembaga	DPPPAKB	22.370.000
V	Program Perlindungan Khusus Anak	Terlaksananya Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,044 %	DPPPAKB	58.199.950

	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang telah mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA	100%	DPPPAKB	19.999.950
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	DPPPAKB	19.999.950
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	100 %	DPPPAKB	38.200.000
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	DPPPAKB	38.200.000
VI	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKK Aktif	100%	DPPPAKB	128.199.500
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat	Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	100%	DPPPAKB	128.199.500

	Sama Dalam Daerah Kabupate/Kota	Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupate/Kota				
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 Lembaga	DPPPAKB	28.199.500
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	DPPPAKB	100.000.000
VII	Program Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Penyediaan Data Keluarga dan KB	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan	100%	DPPPAKB	18.275.000
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	DPPPAKB	18.275.000
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	DPPPAKB	18.275.000
VIII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya ASFR 15-19 Tahun	Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8.17 kelahiran per 1000 WUS	DPPPAKB	126.800.000
		Meningkatnya Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk	Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan	100%	DPPPAKB	

		Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk			
		Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR)	78,40%	DPPPAKB	
		Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	5,37%	DPPPAKB	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	DPPPAKB	11.875.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	DPPPAKB	11.875.000
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 laporan	DPPPAKB	24.975.000
	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	7 organisasi	DPPPAKB	24.975.000

	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,02 %	DPPPAKB	39.950.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	DPPPAKB	19.950.000
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	DPPPAKB	20.000.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kesertaan Ber-KB Kabupaten/ Kota dengan Kesertaan Rendah	55,68%	DPPPAKB	50.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	1 Unit	DPPPAKB	50.000.000
IX	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	83,76%	DPPPAKB	81.800.000

		Meningkatnya Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	100%	DPPPAKB	
		Meningkatnya Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	88%	DPPPAKB	
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 tahun	21,3 Rata-rata usia kawin	DPPPAKB	81.800.000
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	DPPPAKB	30.000.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	DPPPAKB	25.000.000
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi	7 Kelompok	DPPPAKB	26.800.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2026. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci kedalam volume dan satuan harga. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

Secara garis besar, rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tahun 2026 memuat 9 (sembilan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni kurang lebih sebesar Rp **5.515.317.419 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah)** untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang.